

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 102 REVISI 2013 TENTANG  
AKUNTANSI *MURABAHAH* PADA PRODUK PEMBIAYAAN  
*MURABAHAH* DI BMT LA TAHZAN INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Ekonomi (S.E)**

**Oleh**

**BAYU PERMONO**

**NPM. 1551030016**

**Program Studi : Ekonomi Syari'ah  
(Konsentrasi Akuntansi Syari'ah)**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H/2019 M**

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 102 REVISI 2013 TENTANG  
AKUNTANSI *MURABAHAH* PADA PRODUK PEMBIAYAAN  
*MURABAHAH* DI BMT LA TAHZAN INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Ekonomi (S.E)**

Oleh

**BAYU PERMONO**

**NPM. 1551030016**

**Program Studi : Ekonomi Syari'ah  
(Konsentrasi Akuntansi Syari'ah)**

**Pembimbing I : Hj. Mardhiyah Hayati, S.P., M.S.I**

**Pembimbing II : Nur Wahyu Ningsih, M.S.Ak., Akt**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H/2019 M**

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin berkembangnya Lembaga Keuangan syariah atau *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) di tengah masyarakat. Sejalan dengan perkembangan itu, saat ini Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang mengatur tentang Akuntansi pada Keuangan Syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi *murabahah* berdasarkan PSAK 102 revisi 2013 pada produk pembiayaan *murabahah* di BMT La Tahzan Indonesia. Peneliti menggunakan metode kualitatif, dengan sifat penelitian deskriptif.

Data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Dengan menggunakan metode analisis isi, dimana penulis menjabarkan data-data yang diperoleh, kemudian menganalisisnya dengan berpedoman pada sumber-sumber yang diperoleh.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa, perlakuan akuntansi *murabahah* pada produk pembiayaan *murabahah* di BMT La Tahzan Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102 revisi 2013 karena BMT La Tahzan Indonesia tidak menerapkan uang muka dan tidak memberikan potongan apabila ada anggota yang melakukan pelunasan lebih cepat serta menyajikan akun piutang *murabahah* dan margin *murabahah* ditangguhkan dalam satu akun saat pelaporan.

**Kata Kunci :** Akuntansi Syariah, PSAK 102, *Murabahah*, *Baitul Maal wa Tamwil*



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. H. Endro Suratmen Sukarame Bandar Lampung 35131 telp (0721) 704030

---

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bayu Permono

NPM : 1551030016

Tgl Lahir : 03 November 1995

Alamat : Desa Way Galih, Kec. Tanjung Bintang, Kab. Lampung Selatan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENERAPAN PSAK 102 REVISI 2013 TENTANG AKUNTANSI MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT LA TAHZAN INDONESIA”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Way Galih, 10 November 2019  
Yang Membuat Pernyataan,

**Bayu Permono**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmen Sukaramé Bandar Lampung 35131 telp (0721) 704030

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **ANALISIS PENERAPAN PSAK 102 REVISI 2013 TENTANG AKUNTANSI MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT LA TAHZAN INDONESIA**

Nama : Bayu Permono

NPM : 1551030016

Jurusan : Ekonomi Syariah (Konsentrasi Akuntansi Syariah)

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

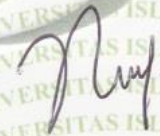
**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Hi. Mardhiyah Hayati, S.P., M.S.I**  
**NIP. 197605922008012010**

  
**Nur Wahyu Ningsih, M.S.Ak., Akt**

Ketua Jurusan,

  
**Madnasir, S.E., M.S.I**

**NIP. 197504242002121001**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmen Sukarame Bandar Lampung 35131 telp (0721) 704030

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **"ANALISIS PENERAPAN PSAK 102 REVISI 2013 TENTANG AKUNTANSI MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT LA TAHZAN INDONESIA"**, disusun oleh Nama : Bayu Permono, NPM : 1551030016, Jurusan : Ekonomi Syariah (Konsentrasi Akuntansi Syariah), telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari, Tanggal : Jum'at 29 November 2019

**TIM DEWAN PENGUJI**

Ketua : Dr. H. Rubhan Masyur, M.Pd

Sekretaris : Okta Suprianingsih, SE., M.Ak

Penguji I : Any Eliza, SE., M.Ak

Penguji II : Hj. Mardhiyah Hayati, S.P., M.S.I

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Abdul Ghofur, S.Ag., M.S.I.  
NIP. 198008012003121001

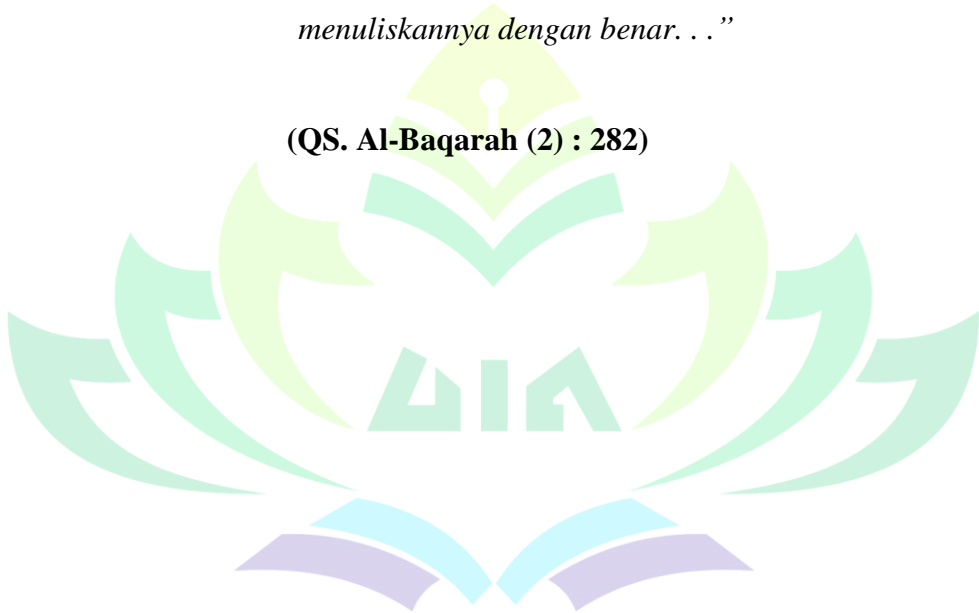


## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ  
وَلْيَكُتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ . . .

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak  
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu  
menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu  
menuliskannya dengan benar. . .”*

**(QS. Al-Baqarah (2) : 282)**



## PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kasih sayang serta rahmat-Nya serta memberikan kemudahan kepada penulis, sholawat beriringan salam selalu penulis sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dari hati yang paling dalam skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada Bapak Suparmo dan Ibu Dian Pramesti Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terimakasih yang tak terhingga. Kupersembahkan karya ini kepada Bapak dan Ibu yang selalu memberikan segalanya demi mendukung keberhasilanku, kasih sayang tiada terhingga yang tidak mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Bapak dan Ibu bahagia. Untuk do'a yang dipanjatkan setiap sujudmu, untuk nasihat-nasihat yang membuatku lebih terarah, untuk setiap keringat dari perjuanganmu, terimakasih Bapak, terimakasih Ibu. Semoga Allah meridhoi.
2. Kepada Ratih Purnama Sari yang menjadi alasanku agar bisa menjadi contoh yang baik. Terimakasih atas dukungan yang selalu kau berikan. Semoga engkau bisa melebihi keberhasilan kakakmu ini.
3. Kepada Inda Ariyanti yang menjadi penyemangat saat mulai bosan dan lelah. Yang telah memberikan visi, misi serta tujuan hidup kedepan. Yang selalu mendampingi dengan sabar serta pengertian. Kita telah selangkah lebih dekat. Semoga Allah mudahkan jalan kita.



## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama lengkap Bayu Permono, lahir di Banjar Agung pada tanggal 3 November 1995 merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Suparmo dan Ibu Dian Pramesti. Saat ini penulis tinggal di Dusun 5 B Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 3 Way Galih Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan pada tahun 2001-2007 kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 24 Bandar Lampung pada tahun 2007-2010 setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 4 Bandar Lampung pada tahun 2010-2013 dan Alhamdulillah kemudian menempuh pendidikan di UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2015-2019.

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan ridho-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan kenikmatan yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan PSAK 102 Revisi 2013 Tentang Akuntansi *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan *Murabahah* di BMT La Tahzan Indonesia” dengan baik dan benar. Sholawat beriringan salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada para sahabat, tabi’in, serta para umatnya.

Skripsi ini ditulis merupakan bagian dan persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program strata satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna mendapatkan gelar sarjana ekonomi (S.E), atas terselesainya skripsi ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Berikut ini penulis secara rinci mengungkapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung beserta jajaran Wakil Dekan 1, 2, dan 3 yang telah memberika izin penelitian kepada penulis.
2. Bapak Madnasir, S.E., M.S.I sebagai ketua jurusan/prodi Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya, atas arahan yang diberikan selama masa pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.

3. Ibu Any Eliza, S.E., M.Ak. sebagai ketua jurusan/prodi Akuntansi Syariah UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya, atas arahan yang diberikan selama masa pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Hj. Mardhiyah Hayati, S.P., M.S.I dan Ibu Nur Wahyu Ningsih, M.S.Ak., Akt yang merupakan Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah tulus meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan benar.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu, pengalaman dan pelajaran kepada penulis selama proses perkuliahan.
6. Seluruh staff akademik dan pegawai perpustakaan yang telah memberikan pelayanan yang baik dan mendapatkan informasi serta sumber referensi kepada penulis.
7. Kepada almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung sebagai tempat penulis belajar dan berproses menjadi lebih baik. Khususnya kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Akuntansi Syariah tempat penulis menuntut ilmu.
8. Kepada Saudara/i Marwoto, Lilik Mawati, Eka Fihayati, Desi Rahayu, Feni Lestari, Yeyen Kumala Sari, Meliana, Wiwin, Joni, Agus Rianto dan seluruh Pengurus BMT La Tahzan Indonesia yang telah memfasilitasi dan mendukung penelitian saya, semoga terus bertumbuh dan lebih luas dalam menebar manfaat.



9. Kepada keluarga besar, Geng Jankre serta Kelompok Nagata yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil serta bantuan do'a yang ditujukan kepada penulis.
10. Para Sahabat yang selalu hadir dan memberi semangat serta nasihat selama 4 tahun masa perkuliahan. Khususnya untuk kelas Akuntansi Syariah A dan Kelompok 281 KKN UIN Raden Intan Lampung Desa Sukoharjo Kab. Pringsewu.
11. Teman-teman UIN Raden Intan Lampung yang tidak mampu penulis sebutkan satu persatu, teman-teman organisasi yang memberikan pengalaman dan pelajaran, mitra dalam transaksi ide dan pikiran. Semoga kita menjadi generasi yang berguna bagi nusa dan bangsa.

Pada akhirnya, penulis mempunyai keinginan mudah-mudahan hasil penelitian ini dapat menjadi amal jariah dan ilmu yang bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Menjadi sumbangan pengetahuan dalam pengembangan ilmu yang ada, khususnya dalam ilmu-ilmu keislaman dan ilmu ekonomi di abad modern ini. Aamiin ya rabbal a'lamiin.

Way Galih, 28 Juni 2019  
Penulis,

Bayu Permono  
NPM. 1551030016

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
1. Lokasi Penelitian.....	13
2. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
3. Sumber Data.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Metode Analisis Data.....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Akuntansi Syariah (PSAK 102 Akuntansi <i>Murabahah</i> ).....	16
1. Pengertian Akuntansi Syariah.....	16
2. Dasar Hukum Akutansi Syariah .....	17
3. PSAK 102 Revisi 2013 Akutansi <i>Murabahah</i> .....	17
4. Akutansi Transaksi <i>Murabahah</i> (PSAK 102 Revisi 2013) .....	25

B. <i>Murabahah</i> .....	33
1. Pengertian <i>Murabahah</i> .....	33
2. Dasar Hukum <i>Murabahah</i> .....	34
3. Rukun dan Syarat <i>Murabahah</i> .....	41
C. <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i> (BMT).....	41
Pengertian <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i> .....	41
Prinsip Utama <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i> .....	45
1. Prosedur Pendirian <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i> (BMT).....	46
2. Produk <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i> (BMT) .....	47
D. Kerangka Berpikir.....	51
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum BMT La Tahzan Indonesia .....	52
1. Sejarah berdirinya BMT La Tahzan Indonesia .....	52
2. Kepengurusan BMT La Tahzan Indonesia.....	54
3. Profil BMT La Tahzan Indonesia.....	55
4. Visi Misi dan Motto BMT La Tahzan Indonesia .....	56
5. Produk-Produk Pada BMT La Tahzan Indonesia .....	57
6. Struktur Organisasi BMT La Tahzan Indonesia 2015-2020 ..	58
B. Gambaran Umum <i>Murabahah</i> pada BMT La Tahzan Indonesia .	59
<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Perlakuan Akuntansi <i>Murabahah</i> pada BMT La Tahzan Indonesia .....	62
B. Kesesuaian Perlakuan Akuntansi <i>Murabahah</i> pada BMT La Tahzan Indonesia dengan PSAK 102 Revisi 2013.....	70
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penelitian Terdahulu .....	8
Tabel 2.1	Jurnal <i>wakalah</i> antara bank syariah dan nasabah .....	26
Tabel 2.2	Jurnal Penyerahan Barang .....	26
Tabel 2.3	Jurnal Saat Akad <i>Murabahah</i> Tidak Jadi Disepakati .....	27
Tabel 2.4	Jurnal Saat Akad <i>Murabahah</i> Disepakati .....	27
Tabel 2.5	Jurnal Biaya-Biaya yang Ditangguhkan Mitra .....	28
Tabel 2.6	Jurnal Pembayaran Angsuran Jatuh Tempo .....	29
Tabel 2.7	Angsuran Setelah Tanggal Jatuh Tempo .....	30
Tabel 2.8	Pencatatan Angsuran Mitra Setelah Jatuh Tempo .....	30
Tabel 2.9	Pembayaran Angsuran Sebagian Saat Jatuh Tempo.....	30
Tabel 2.10	Pembayaran Angsuran Setelah Jatuh Tempo .....	31
Tabel 2.11	Pembayaran Angsuran Setelah jatuh Tempo dan Denda .....	31
Tabel 2.12	Potongan Diberikan Saat Pelunasan .....	32
Tabel 2.13	Potongan Setelah Pelunasan .....	33
Tabel 3.1	Daftar Dewan Pengawas BMT La Tahzan Indonesia .....	54
Tabel 3.2	Daftar Pengurus BMT LA Tahzan Indonesia.....	55
Tabel 4.1	Rincian Angsuran Piutang <i>Murabahah</i> .....	64
Tabel 4.2	Jurnal Transaksi Penyerahan Uang Dari BMT Kepada Anggota..	65
Tabel 4.3	Jurnal Transaksi Penyerahan Bukti Pembelian Aset <i>Murabahah</i> Oleh Anggota Kepada BMT .....	65
Tabel 4.4	Jurnal Pada Saat Mengakui dan Mengukur Perjualan Aset <i>Murabahah</i> .....	66
Tabel 4.5	Jurnal Transaksi Biaya-Biaya.....	66
Tabel 4.6	Agsuran Pembayaran Piutang <i>Murabahah</i> .....	67
Tabel 4.7	Jurnal Pembayaran Angsuran .....	68
Tabel 4.8	Jurnal Pengakuan Keuntungan .....	68
Tabel 4.9	Jurnal Pembayaran Denda .....	69
Tabel 4.10	Karakteristik Perlakuan Akuntansi <i>Murabahah</i> PSAK 102 Revisi 2013 dan Perlakuan Akuntansi <i>Murabahah</i> BMT La Tahzan Indonesia .....	71

Tabel 4.11	Pencatatan (Pengakuan dan Pengukuran) Perlakuan Akuntansi <i>Murabahah</i> PSAK 102 Revisi 2013 dan Perlakuan Akuntansi <i>Murabahah</i> BMT La Tahzan Indonesia .....	72
Tabel 4.12	Penyajian Perlakuan Akuntansi <i>Murabahah</i> PSAK 102 Revisi 2013 dan Perlakuan Akuntansi <i>Murabahah</i> BMT La Tahzan Indonesia .....	74
Tabel 4.13	Pengungkapan Perlakuan Akuntansi <i>Murabahah</i> PSAK 102 Revisi 2013 dan Perlakuan Akuntansi <i>Murabahah</i> BMT La Tahzan Indonesia .....	74
Tabel 4.14	Rangkuman Kesesuaian Perlakuan Akuntansi <i>Murabahah</i> di BMT La Tahzan Indonesia dengan PSAK 102 Revisi 2013 .....	75



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : PSAK 102 Akuntansi *Murabahah*
- Lampiran 2 : Akad *Murabahah*  
Akad *Wakalah*  
Akad Pemesanan Barang  
Aplikasi Pembukaan Simpanan  
Aplikasi Pembiayaan
- Lampiran 3 : Laporan Arus Kas BMT La Tahzan Indonesia 2018  
Laporan Laba/Rugi BMT La Tahzan Indonesia 2018  
Neraca Saldo BMT La Tahzan Indonesia 2018  
Simulasi Pembagian SHU BMT La Tahzan Indonesia 2018  
Laporan Arus Kas Baitul Maal Tahun Buku 2018
- Lampiran 4 : Pedoman Wawancara  
Rangkuman Hasil Wawancara  
Alur Pembiayaan *Murabahah* BMT La Tahzan Indonesia  
Dokumentasi
- Lampiran 5 : Surat Izin Riset  
Kartu Konsultasi Skripsi  
Berita Acara Seminar Proposal  
Surat Keputusan (SK)



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia konsep ekonomi syariah mulai diterapkan sejak 1991 yang diawali dengan beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 Mei 1991 sebagai bank umum pertama yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Tujuan Bank Muamalat Indonesia harus disesuaikan dengan bermuamalat menurut ketentuan syariat Islam serta situasi dan kondisi di Indonesia, baik di bidang ekonomi, sosial budaya, hukum maupun politik.<sup>1</sup> Seiring berkembangnya perbankan syariah kemudian muncul lembaga keuangan sejenis lainnya. Termasuk lembaga keuangan yang memposisikan dirinya bagi usaha kecil dan mikro, yaitu koperasi syariah atau dikenal dengan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT).

BMT merupakan lembaga keuangan kecil dan mikro yang berbadan hukum koperasi ini di operasionalkan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha kecil dan mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari masyarakat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang berasaskan keselamatan, keadilan, kedamaian dan kesejahteraan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Warkum Sumitro, *Asas – asas perbankan Islam dan lembaga – lembaga terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah) di Indonesia*, Edisi Revisi Cet. 4, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), h. 87

<sup>2</sup> Putu Anggreni, "5 Ribu BMT 5 Juta Usaha Mikro", dalam majalah Investor, (September 2010): h. 73

Dasar hukum BMT adalah koperasi syariah, karena berbadan hukum koperasi maka BMT harus tunduk pada undang-undang No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Penggunaan akuntansi syariah dalam Koperasi didasari oleh SK Menteri Koperasi dan UKM Nomor: 91/Kep/M.UKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi dan Jasa Keuangan Syariah serta PERMEN KUMKM Republik Indonesia No. 14/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.

Ada banyak produk penghimpunan dan penyaluran dana yang dapat dikembangkan sebuah lembaga keuangan syariah termasuk BMT. Pada umumnya, BMT memberikan pembiayaan berdasarkan jual beli (*al-Bai'*) seperti *murabahah*, prinsip sewa atau multijasa (*Ijarah*), prinsip kemitraan (*partnership*) yaitu prinsip penyertaan (*musyarakah*), prinsip bagi hasil (*mudharabah*), dan prinsip non-profit (*Al-Qordhul Hasan*).<sup>3</sup>

Salah satu transaksi syariah dan merupakan bagian dari produk pembiayaan perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya adalah *murabahah*. *Murabahah* adalah menjual suatu barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah margin atau keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.<sup>4</sup> Jual beli dengan menggunakan akad *murabahah* kini diterapkan di seluruh perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah dan telah dianggap sesuai dengan prinsip syariah.

---

<sup>3</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), h.101-103

<sup>4</sup> Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*. Penerbit. IAI, Jakarta. 2010. h.74

Al-Qur'an juga telah mengutip akad *murabahah* dengan menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba dalam Surat Al-Baqarah Ayat 275 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : “Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu dan urusannya kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah (2) : 275)

Produk pembiayaan *murabahah* dapat dilakukan secara angsuran ataupun ditangguhkan dengan kesepakatan bersama. Dalam prakteknya sebagian besar kontrak *murabahah* yang dilakukan adalah dengan menggunakan sistem *murabahah* dengan pesanan. Kondisi ini dapat dimaklumi mengingat lembaga keuangan syariah bukanlah sebagai tempat yang menyediakan suatu barang tertentu yang dibutuhkan oleh seorang nasabah. Untuk mengadakan barang atau komoditas yang



dibutuhkan nasabah, pihak lembaga keuangan syariah terlebih dahulu melakukan pemesanan kepada pemasok yang kemudian disalurkan kepada nasabah yang memesannya. Oleh karena rumitnya skema pembiayaan *murabahah* maka dibutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga dapat mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dan kualitas yang dapat diandalkan.<sup>5</sup>

Islam sejak awal telah memiliki aturan-aturan dalam bermuamalah yang ditetapkan Allah SWT salah satunya untuk melakukan pencatatan atas segala transaksi dengan benar. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”*(QS. Al-Baqarah (2) : 282)

Ayat tersebut menegaskan prinsip akuntabilitas dan transparansi memberikan arahan bahwa lembaga bisnis harus menunjukkan keterbukaan dan menggunakan konsep pencatatan.

---

<sup>5</sup> Inggrid eka Pratiwi dan Dina fitrisia septiarini, “Analisis Penerapan PSAK-102 *Murabahah* (Studi Kasus Pada KSU BMT Rahmat Syariah Kediri)” *Jurnal Akuntansi Akrua* 6 (1) (2014): 17-32 e-ISSN: 2502-6380, h. 18

Akuntansi yang berdasarkan prinsip syariah merupakan kunci sukses bagi bank/lembaga keuangan syariah untuk menjalankan sistemnya dalam rangka melayani masyarakat. Standar akuntansi tersebut akan terefleksi dalam sistem akuntansi yang digunakan sebagai dasar dalam pembuatan sistem laporan keuangan. IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) sudah mengeluarkan PSAK Akuntansi Keuangan Syariah No. 59 dan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah. Namun Pada 27 Juni 2007 IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) mengeluarkan PSAK 100-111 sebagai Revisi dari PSAK Akuntansi keuangan Syariah No. 59. Segala hal yang berkaitan dengan pencatatan transaksi jual beli *murabahah* terangkum dalam PSAK 102 Akuntansi *Murabahah*. Dalam perjalanannya Ikatan Akuntansi Indonesia telah melakukan revisi pada PSAK 102 Akuntansi *Murabahah* sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 30 September 2013 dan 25 Mei 2016 yang kini berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2017 hingga saat ini.

BMT La Tahzan Indonesia adalah lembaga keuangan yang berada di Jl. Perjuangan Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung. Didirikan sejak tanggal 2 November 2014 sampai saat ini telah memiliki ribuan anggota. BMT La Tahzan Indonesia memiliki beberapa produk pembiayaan yaitu *Mudharabah*, *Murabahah*, *Ijaroh*, *Hawalah* dan *Musyarakah*. Diantara kelima produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT La Tahzan Indonesia, Pembiayaan dengan Akad *Murabahah* merupakan produk

yang paling diminati oleh anggota BMT La Tahzan Indonesia yaitu 89% dari total seluruh pembiayaan yang dilakukan sedangkan *mudharabah* 1%, *ijaroh* 4% dan *hawalah* 6%. Pembiayaan *murabahah* yang dilakukan di BMT La Tahzan Indonesia dibatasi jumlah maksimal yaitu 10 juta rupiah yang biasanya digunakan untuk jual beli perabotan rumah tangga seperti lemari, sofa, tempat tidur maupun peralatan elektronik seperti televisi, handphone, laptop, lemari es, mesin cuci dan lain sebagainya.

Dapat diketahui bahwa sejak BMT La Tahzan Indonesia berdiri belum ada yang penelitian tentang prosedur pembiayaan *murabahah* yang diterapkan oleh BMT La Tahzan Indonesia sehingga dalam pelaksanaannya selama ini menggunakan prinsip dan aturan yang di buat sendiri oleh BMT La Tahzan Indonesia tanpa menggunakan standar yang berlaku di Indonesia yaitu PSAK 102.

Melihat banyaknya minat masyarakat yang menggunakan akad *murabahah* di BMT La Tahzan Indonesia maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penerapan produk pembiayaan *murabahah* pada BMT La Tahzan Indonesia. Dalam hal ini penulis menulis penelitian tersebut dengan judul : **“Analisis Penerapan PSAK 102 Revisi 2013 Tentang Akuntansi *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan *Murabahah* di BMT La Tahzan Indonesia”**

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana penerapan PSAK 102 Revisi 2013 tentang akuntansi *murabahah* pada produk pembiayaan *murabahah* di BMT La Tahzan Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui perlakuan PSAK 102 Revisi 2013 tentang akuntansi *murabahah* pada produk pembiayaan *murabahah* di BMT La Tahzan Indonesia.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai sarana informasi untuk para Anggota BMT La Tahzan Indonesia yang ingin mengetahui perlakuan akuntansi transaksi *murabahah* pada BMT La Tahzan Indonesia.

Dengan disusunnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif bagi berbagai pihak. Diantaranya :

### **1. Bagi BMT La Tahzan Indonesia**

Memberikan Evaluasi dalam penerapan akuntansi yang selama ini diterapkan dengan kesesuaian standar yang berlaku di Indonesia serta referensi terhadap pengembangan sistem kerja yang lebih baik.

### **2. Bagi Dewan Pengawas Syariah BMT La Tahzan Indonesia**

Membantu dalam proses pengawasan BMT La Tahzan Indonesia serta menjadi sarana untuk bertukar pikiran dan menambah pengetahuan dalam hal praktik ekonomi syariah.

### 3. Bagi Akademisi

Memberi kontribusi akademisi bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan untuk wacana melaksanakan penelitian selanjutnya.

### 4. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan pengetahuan serta pengalaman dalam mempraktekkan teori yang telah diperoleh dan memadukannya dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

## E. Tinjauan Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, penulis melakukan tinjauan pustaka yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti, diantaranya :

Tabel 1.1  
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Hasil penelitian
1.	Rani Febrian dan Sepky Mardian dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “Penerapan PSAK NO. 102 Atas Transaksi <i>Murabahah</i> : Studi Pada Baitul Maal Wa Tamwil Di Depok, Jawa Barat” <sup>6</sup>	Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data. Dari 13 BMT di Kota Depok yang telah menerapkan PSAK 102 atas transaksi <i>murabahah</i> . Penerapan PSAK 102 yang terbagi menjadi empat komponen dimana setiap komponen tersebut telah diterapkan oleh BMT di Kota Depok yang menjadi objek penelitian ini, meskipun tidak seluruhnya. Kemudian jika dirata-ratakan jawaban responden di BMT tersebut yang telah menerapkan PSAK 102 sebesar 68,4% dan yang belum menerapkan PSAK 102 sebesar 31,6%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 13 BMT di Kota Depok rata-rata telah menerapkan PSAK 102 atas transaksi <i>murabahah</i> .

<sup>6</sup> Rani Febrian dan Sepky Mardian “Penerapan PSAK NO. 102 Atas Transaksi *Murabahah*: Studi Pada Baitul Maal Wa Tamwil Di Depok, Jawa Barat” *Journal of Islamic Economics and Business* Volume 2, No 1 (2017) h.39



2	<p>Israa Mansour and Yousef Sa'adeh in his research journal entitled "Evaluating Murabaha in Islamic Banks"<sup>7</sup></p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka penulis menarik kesimpulan bahwa bank syariah dalam praktik pelaksanaannya masih sama dengan bank konvensional. Hal ini terbukti dalam <i>Murabahah</i> atas perintah pembeli yang mewakili 40% -80% kegiatan bank syariah, berkonsentrasi pada penjualan mobil yang bukan merupakan investasi nyata dalam perekonomian nasional. Sejauh ini, sebagian besar Muslim setuju untuk mendukung kegiatan bank Reba, dan lebih dari sekadar untuk bank syariah! Dalam kondisi ini, tidak mudah untuk membentuk hal yang baik sebagai lembaga keuangan Islam, karena harus ditanam dalam kondisi yang baik untuk tumbuh sebagai tanaman Islam murni. Jadi, Muamalat yang mewakili 40-80% dari operasi bank syariah adalah melanggar hukum.</p>
3	<p>Muzayyidatul Habibah dan Alfu Nikmah dalam jurnal penelitiannya yang berjudul "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> di BMT Se-Kabupaten Pati"<sup>8</sup></p>	<p>Pada aspek pengakuan dan Pengukuran, terdapat BMT yang masih melakukan pengakuan persediaan, seharusnya tidak perlu karena praktik yang dilakukan merupakan transaksi pembiayaan <i>murabahah</i> bukan transaksi <i>murabahah</i> berbasis jual beli secara riil. Pihak BMT sudah melakukan pengakuan piutang <i>murabahah</i>, yang seharusnya dilakukan karena praktik yang dilakukan merupakan transaksi pembiayaan <i>murabahah</i>. Pada aspek penyajian, pihak BMT sudah menyusun laporan keuangan Neraca, namun tidak dapat terlihat nilai cadangan kerugian piutang <i>murabahah</i>. Pada laporan laba/rugi tidak terlihat adanya biaya kerugian penurunan piutang <i>murabahah</i></p>

<sup>7</sup> Israa Mansour and Yousef Sa'adeh "Evaluating Murabaha in Islamic Banks" International Journal for Innovation Education and Research Vol:-4 No-06, 2016 p.188

<sup>8</sup> Muzayyidatul Habibah dan Alfu Nikmah "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan *Murabahah* Di Bmt Se-Kabupaten Pati" *Jurnal Ekonomi Syariah Volume 4, Nomor 1, Juni 2016*, h.134

		karena memang hal tersebut tidak diakui/dicatat pada jurnal umum. Pada aspek pengungkapan, pihak BMT sudah mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi <i>murabahah</i> , meliputi harga perolehan aset <i>murabahah</i> ; janji pemesanan dalam <i>murabahah</i> berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan.
4	Parno dan Tikawati dalam jurnalnya penelitiannya yang berjudul “Analisis Penerapan PSAK No. 102 untuk Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada KPN IAIN Samarinda” <sup>9</sup>	Perlakuan akuntansi <i>murabahah</i> pada KPN IAIN Samarinda yang berkaitan dengan pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 102. Secara garis besar perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh KPN IAIN Samarinda telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum yaitu PSAK No. 102. Tetapi masih ada pada saat terjadi tunggakan angsuran dan penerimaan angsuran tunggakan, implementasinya KPN IAIN Samarinda tidak mencatat jurnal apapun atau tidak ada perlakuan akuntansi. Seharusnya dalam PSAK No. 102 diatur pada saat terjadinya tunggakan angsuran dan penerimaan angsuran tunggakan, margin diakui proporsional dengan kas yang diterima.

<sup>9</sup> Parno dan Tikawati “Analisis Penerapan PSAK No. 102 untuk Pembiayaan *Murabahah* pada KPN IAIN Samarinda” *Jurnal Ekonomi Islam (Islamic Economics Journal)* Vol.4, No.2 Juli - Desember 2016, h.313

5	<p>Inggrid Eka Pratiwi dan Dina Fitrisia Septiarini dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “Analisis Penerapan PSAK - 102 <i>Murabahah</i> (Studi Kasus pada KSU BMT Rahmat Syariah Kediri)”<sup>10</sup></p>	<p>Dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terhadap transaksi awal akad tidak sesuai dengan PSAK 102. Selama proses akad, dalam hal pengukuran keuntungan <i>murabahah</i> telah sesuai dengan PSAK 102, namun dalam hal pengakuan, penyajian, dan pengungkapan tidak sesuai dengan PSAK 102.. Dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan denda sesuai dengan PSAK 102 hanya penyajiannya saja yang tidak sesuai dengan PSAK 102. Pada saat pelunasan pengukuran telah sesuai dengan PSAK 102, namun pengakuan, penyajian, dan pengungkapan tidak sesuai dengan PSAK 102.</p>
6	<p>Solikhul Hidayat dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “Penerapan Akuntansi Syariah Pada Bmt Lisa Sejahtera Jepara”<sup>11</sup></p>	<p>Hasil analisis penelitiannya, BMT Lisa Sejahtera meskipun sudah berpola syariah, namun produk atau jasanya tidak sesuai dengan yang ada di PSAK Syariah. Karena produk atau jasa yang ada di BMT Lisa Sejahtera tidak sesuai dengan produk atau jasa yang ada di PSAK Syariah, maka transaksi di BMT Lisa Sejahtera tidak sesuai dengan PSAK Syariah. Penyajian Laporan Keuangan BMT Lisa Sejahtera meskipun sudah berpola syariah, namun belum sesuai dengan yang ada di PSAK Syariah.</p>

<sup>10</sup> Inggrid eka Pratiwi dan Dina fitrisia septiarini, “Analisis Penerapan PSAK - 102 *Murabahah* (Studi Kasus pada KSU BMT Rahmat Syariah Kediri)”, *Jurnal Akuntansi AKRUAL* 6 (1) (2014) h.30

<sup>11</sup> Solikhul Hidayat, “Penerapan Akuntansi Syariah Pada BMT Lisa Sejahtera Jepara”, *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis* Vol. 10 No. 2 Oktober 2013, h. 178

7	Muhammad Rusydi dan Sri Salasiah Nasir dalam jurnalnya penelitiannya yang berjudul "Perlakuan Akuntansi <i>Murabahah</i> ditinjau dari PSAK no. 102 pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar" <sup>12</sup>	Dalam pengimplementasian PSAK No.102 mengenai Akuntansi <i>Murabahah</i> dan merujuk pada Hipotesis penulis, menyimpulkan bahwa PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar belum menerapkan PSAK No.102 mengenai Akuntansi <i>Murabahah</i> dengan sepenuhnya, ditandai dimana surat edaran operasi yang dikeluarkan hanya mengatur bank sebagai penjual saja, sedangkan yang diketahui bahwa dalam PSAK No.102 tidak hanya mengatur ketentuan pengakuan dan pengukuran <i>murabahah</i> dari perspektif penjual saja melainkan juga dari perspektif pembeli.
---	---	--

## F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dalam bentuk desain deskriptif. Metode kualitatif adalah pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Metode ini digunakan untuk menyajikan secara langsung hakikat hubungan antar peneliti dan responden. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama pola-pola nilai yang dihadapi.<sup>13</sup> Penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan serta menjelaskan penerapan sistem akuntansi *murabahah* berdasarkan PSAK 102 Revisi 2013 terhadap produk pembiayaan *murabahah* di BMT La Tahzan Indonesia.

<sup>12</sup> Muhammad Rusydi dan Sri Salasiah Nasir "Perlakuan Akuntansi *Murabahah* ditinjau dari PSAK no. 102 pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar" *Jurnal Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Volume 1*No. 1 Januari-April 2009, h. 28

<sup>13</sup> Susiadi AS, Metodologi Penelitian, (Bandar Lampung : Fakultas Syariah, 2014), h. 3

## 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di BMT La Tahzan Indonesia. Yang beralamatkan di Jl. Perjuangan Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung 35361.

## 2. Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini bersifat penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.<sup>14</sup>

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>15</sup>

## 3. Sumber Data

Data yang di pergunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti.<sup>16</sup> Data yang dimaksud disini adalah data yang diperoleh melalui wawancara kepada pimpinan, manager keuangan, staff accounting dan bagian marketing di BMT La Tahzan Indonesia
- b. Data sekunder adalah data yang lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari penelitian, bisa

---

<sup>14</sup> Nurul zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori – Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 47

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 92

<sup>16</sup> Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.57



diperoleh dari instansi, perpustakaan, maupun pihak lainnya.<sup>17</sup>

Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa dokumen, yaitu data pembiayaan *murabahah*, laporan keuangan, alur pembiayaan, formulir permohonan pembiayaan dan buku-buku yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi *murabahah*, jurnal, serta data lainnya yang dapat membantu agar data menjadi relevan dalam penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data, metode yang digunakan yaitu :

##### a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).<sup>18</sup> Wawancara ini dilakukan dengan bertanya jawab secara langsung kepada pimpinan, manager keuangan dan staf yang ada di BMT La Tahzan Indonesia.

##### b. Dokumentasi

Metode pengumpulan data secara dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi, dan sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto,

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 58

<sup>18</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Cetakan Kesepuluh, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h.170

cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Dokumentasi disini dimaksudkan untuk menghimpun data yang berupa dokumen BMT La Tahzan Indonesia secara umum. Adapun dokumen yang dihimpun meliputi : gambaran umum BMT La Tahzan Indonesia, struktur organisasi BMT La Tahzan Indonesia, laporan keuangan, dan dokumen lain yang mendukung kelengkapan data penelitian.

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami.<sup>19</sup>

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa isi, yaitu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicable*), dengan memerhatikan konteksnya. Analisis isi berhubungan dengan komunikasi atau isi komunikasi.<sup>20</sup> Penulis menjabarkan data-data yang diperoleh, kemudian menganalisisnya dengan berpedoman pada sumber yang diperoleh.

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D, cet. Ke 20*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 244-245

<sup>20</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h.155

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Akuntansi Syariah (PSAK 102 Akuntansi *Murabahah*)

##### 1. Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi adalah suatu disiplin yang menyediakan informasi penting sehingga memungkinkan adanya pelaksanaan dan penilaian jalannya perusahaan secara efisien. Akuntansi dapat juga didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.<sup>21</sup>

Akuntansi merupakan bahasa bisnis yang dapat memberikan informasi atau mengkomunikasikan kondisi bisnis dan hasil usahanya pada suatu waktu atau pada suatu periode tertentu.<sup>22</sup>

Akuntansi syariah adalah seperangkat ilmu pengetahuan dan teknologi ciptaan manusia yang digunakan untuk penyajian data keuangan dasar (bahan olah akuntansi) yang terjadi dari kejadian-kejadian, transaksi-transaksi, atau kegiatan transaksi suatu unit organisasi dengan cara tertentu untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum islam dan moralitas.

---

<sup>21</sup> Soemarso S.R. *Akuntansi suatu Pengantar Edisi 5 Revisi*. (Jakarta. Salemba Empat, 2009).  
h. 14

<sup>22</sup> Sofyan syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26

## 2. Dasar Hukum Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mencerminkan ketegasan agama Islam dalam kehidupan manusia bahwasannya setiap apapun yang kita lakukan akan dicatat oleh malaikat dan akan mendapat balasan di akhirat kelak.

Dasar hukum yang melandasi penerapan akuntansi dalam kehidupan terdapat pada surat Al-Baqarah : 282 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ  
وَلْيَكُتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”*(QS. Al-Baqarah (2) : 282)

Menurut tafsir Jalalayn (Hai orang-orang yang beriman! Jika kamu mengadakan utang piutang), maksudnya muamalah seperti jua beli, sewa-menyewa, utang-piutang dan lainnya (secara tidak tunai), misalnya pinjaman atau pesanan (untuk waktu yang ditentukan) atau diketahui, (maka hendaklah kamu catat) untuk pengukuhan dan menghilangkan pertikaian nantinya. (Dan hendaklah ditulis) surat utang itu (di antara kamu oleh seorang dengan adil) maksudnya benar tanpa menambah, mengurangi jumlah utang atau jumlah temponya. Ayat tersebut menjadi dasar implikasi akuntansi. Didalamnya menegaskan penerapan akuntansi dan pencatatan saat bermuamalah.

### 3. PSAK 102 Revisi 2013 Akuntansi *Murabahah*

#### a. Karakteristik

- 1) *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian setelah ada pemesanan dari pembeli.
- 2) *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya.
- 3) Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.
- 4) Akad *murabahah* memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad *murabahah* dilakukan. Namun jika akad telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan.
- 5) Harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad *murabahah*, maka diskon itu merupakan hak pembeli.
- 6) Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain, meliputi:
  - a) diskon dalam bentuk apa pun atas pembelian barang;



- b) diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang;
  - c) komisi dalam bentuk apa pun yang diterima terkait dengan pembelian barang.
- 7) Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad *murabahah* disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika tidak diatur dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak penjual.
- 8) Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang *murabahah*, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual dan/atau aset lainnya.
- 9) Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang *murabahah*, jika akad *murabahah* disepakati. Jika akad *murabahah* batal, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh penjual. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli.
- 10) Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang *murabahah* sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh

force majeure. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan ta'zir yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan.

11) Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang *murabahah* jika pembeli:

- a) melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu; atau
- b) melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati.

12) Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang *murabahah* yang belum dilunasi jika pembeli:

- a) melakukan pembayaran cicilan tepat waktu; dan/atau
- b) mengalami penurunan kemampuan pembayaran

#### **b. Pengakuan dan Pengukuran**

1) Pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.

2) Pengukuran aset *murabahah* setelah perolehan adalah sebagai berikut:

- a) jika *murabahah* pesanan mengikat, maka:
  - (1) dinilai sebesar biaya perolehan; dan
  - (2) jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah,

penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset:

b) jika *murabahah* tanpa pesanan atau *murabahah* pesanan tidak mengikat, maka:

- (1) dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai netto yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan
- (2) jika nilai netto yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

3) Diskon pembelian aset *murabahah* diakui sebagai:

- a) pengurang biaya perolehan aset *murabahah*, jika terjadi sebelum akad *murabahah*;
- b) liabilitas kepada pembeli, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli;
- c) tambahan keuntungan *murabahah*, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad menjadi hak penjual; atau
- d) pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan tidak diperjanjikan dalam akad.

4) Liabilitas penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat:

- a) dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian;

- b) dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.
- 5) Pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai neto yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.
- 6) Keuntungan *murabahah* diakui:
- a) pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun; atau
  - b) selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode berikut ini digunakan, dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi *murabahah*-nya:
    - (1) Keuntungan diakui saat penyerahan aset *murabahah*.  
Metode ini terapan untuk *murabahah* tangguh di mana risiko penagihan kas dari piutang *murabahah* dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil.
    - (2) Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*. Metode ini terapan untuk transaksi *murabahah* tangguh di mana

risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.

(3) Keuntungan diakui saat seluruh piutang *murabahah* berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi *murabahah* tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktik, metode ini jarang dipakai, karena transaksi *murabahah* tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.

7) Potongan pelunasan piutang *murabahah* yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*.

8) Pemberian potongan pelunasan piutang *murabahah* dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut:

- a) diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah*; atau
- b) diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli.



9) Potongan angsuran *murabahah* diakui sebagai berikut:

- a) jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*;
- b) jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban.

10) Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan

11) Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:

- a) uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima;
- b) jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok);
- c) jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

### c. Penyajian

Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang *murabahah*.

Beban *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) utang *murabahah*

#### d. Pengungkapan

Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) harga perolehan aset *murabahah*;
- 2) janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan
- 3) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.<sup>23</sup>

#### 4. Akuntansi transaksi *murabahah* (PSAK 102 Revisi 2013)

##### a. Saat Negosiasi

Pada waktu negosiasi, bank syariah tidak melakukan jurnal apa pun mengingat negosiasi tersebut belum memiliki implikasi terhadap posisi keuangan bank syariah.<sup>24</sup>

##### b. Pembelian barang pesanan

Pembelian barang pesanan dapat dilakukan dengan dua alternatif, yaitu (1) bank membeli sendiri barang yang dipesan; dan (2) bank mewakilkan kepada nasabah pembeli membeli barang yang dipesan atas nama bank syariah. Dalam hal ini alternatif mewakilkan kepada nasabah merupakan hal yang umum

<sup>23</sup> IAI, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Murabahah*, (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2013) h. 102. 2

<sup>24</sup> Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawijaya, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah; Teori dan Praktek Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016) h. 170

diterapkan oleh perbankan syariah.

Bank mewakilkan kepada nasabah pembeli untuk membeli barang atas nama bank syariah.

Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Jurnal *wakalah* antara bank syariah dan nasabah

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
	Db. Piutang <i>Wakalah</i>	xxx	
	Kr. Rekening nasabah		xxx

Sumber : Rizal Yaya, dkk. (Akuntansi Perbankan Syariah)

Pada saat nasabah/pembeli menyerahkan barang, maka bank syariah melakukan jurnal:

Tabel 2.2  
Jurnal penyerahan barang

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
	Db. Persediaan aset <i>murabahah</i>	xxx	
	Kr. Piutang <i>wakalah</i>		xxx

Sumber : Rizal Yaya, dkk. (Akuntansi Perbankan Syariah)

#### c. Saat akad *murabahah* tidak jadi disepakati

Berdasarkan PSAK 102 paragraf 7 disebutkan bahwa *murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat untuk pembelian barang yang dipesannya. Selanjutnya, berdasarkan PSAK 102 paragraf 30 disebutkan bahwa jika barang batal dibeli oleh pembeli. Maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan penjual.

Tabel 2.3  
Jurnal Saat Akad *Murabahah* Tidak Jadi Disepakati

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
	Db. Uang muka	xxx	
	Kr. Pendapatan operasional		xxx
	Kr. Kas		xxx

Sumber : Rizal Yaya, dkk. (Akuntansi Perbankan Syariah)

**d. Saat akad *murabahah* disepakati**

Pada saat akad *murabahah* jadi disepakati tersebut terdapat beberapa transaksi yang perlu dicatat, yaitu :

1) Pencatatan penjualan *murabahah*

Berdasarkan PSAK 102 paragraf 22, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini, bank tidak perlu mengakui dan mengukur nilai uang muka yang digunakan nasabah dalam jurnal. Dengan demikian, jurnal saat penjualannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4  
Jurnal Saat Akad *Murabahah* Disepakati

Tgl	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit(Rp)
	Db. Piutang <i>Murabahah</i>	xxx	
	Kr. Persediaan aset <i>Murabahah</i>		xxx
	Kr. Margin <i>murabahah</i> yang ditanggungkan		xxx

Sumber : Rizal Yaya, dkk. (Akuntansi Perbankan Syariah)

2) Pencatatan biaya-biaya yang ditanggung nasabah

Sehubungan dengan pembiayaan yang diberikan, bank membebankan beberapa jenis biaya kepada nasabah.

Tabel 2.5  
Jurnal Pencatatan Biaya-Biaya Ditangguh Mitra

Tgl	Keterangan	Debit(Rp)	Kredit(Rp)
	Db. Kas	xxx	
	Kr. Pendapatan Administrasi		xxx
	Kr. Persediaan materai		xxx
	Kr. Rekening notaris		xxx
	Kr. Rekening perusahaan asuransi		xxx

Sumber : Rizal Yaya, dkk. (Akuntansi Perbankan Syariah)

**e. Pembayaran angsuran dan pengakuan keuntungan *murabahah***

Pengakuan keuntungan *murabahah* dibedakan berdasarkan waktu pelunasan piutang *murabahah*, yaitu masa satu tahun atau lebih. Jika *murabahah* dilakukan secara tunai atau tangguh yang tidak melebihi satu tahun, maka keuntungan *murabahah* dilakukan secara tunai (PSAK 102 paragraf 23 (a)). Jika *murabahah* dilakukan dengan transaksi tangguh lebih dari satu tahun, terdapat beberapa alternatif metode pengakuan yang sesuai dengan karakteristik resiko dan upaya transaksi *murabahah*nya (PSAK 102 paragraf 23(b)). Beberapa metode tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Keuntungan diakui saat penyerahan asset *murabahah*. Metode ini diterapkan untuk *murabahah* tangguh dimana resiko penagihan kas dari piutang *murabahah* dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif rendah.
- 2) Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*. Metode ini diterapkan untuk transaksi *murabahah* tangguh dimana resiko piutang

tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.

- 3) Keuntungan diakui saat seluruh piutang *murabahah* berhasil ditagih. Metode ini diterapkan untuk transaksi *murabahah* tangguh dimana resiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktik metode ini jarang dipakai karena transaksi *murabahah* tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.

Terdapat beberapa pola pembayaran angsuran nasabah sebagai berikut:

- 1) Pembayaran angsuran dilakukan pada saat jatuh tempo

Tabel 2.6  
Jurnal Pembayaran Angsuran Jatuh Tempo

Tgl	Keterangan	Debit(Rp)	Kredit(Rp)
	Db. Kas	xxx	
	Kr. Piutang <i>Murabahah</i>		xxx
	Db. Margin <i>Murabahah</i>	xxx	
	Kr. Pendapatan margin <i>murabahah</i>		xxx

Sumber : Rizal Yaya, dkk. (Akuntansi Perbankan Syariah)

- 2) Pembayaran angsuran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo tanpa dikenakan denda.



Tabel 2.7  
Angsuran Setelah Tanggal Jatuh Tempo

Tgl	Keterangan	Debit(Rp)	Kredit(Rp)
	Db. Piutang <i>murabahah</i> jatuh Tempo	xxx	
	Kr. Piutang <i>murabahah</i>		xxx
	Db. Margin <i>murabahah</i> yang Ditangguhkan	xxx	
	Kr. Pendapatan margin <i>murabahah</i> Akrua		xxx

Sumber : Rizal Yaya, dkk. (Akuntansi Perbankan Syariah)

Saat mitra (nasabah) membayar angsuran :

Tabel 2.8  
Pencatatan Angsuran Mitra Setelah Jatuh Tempo

Tgl	Keterangan	Debit(Rp)	Kredit(Rp)
	Db. Kas	xxx	
	Kr. Piutang <i>murabahah</i> jatuh Tempo		xxx
	Db. Pendapatan margin <i>murabahah-akrua</i>	xxx	
	Kr. Pendapatan margin <i>murabahah</i>		xxx

Sumber : Rizal Yaya, dkk. (Akuntansi Perbankan Syariah)

- 3) Pembayaran angsuran dilakukan sebagian pada waktu tanggal jatuh tempo dan sebagian lagi setelah jatuh tempo tanpa dikenakan denda.

Tabel 2.9  
Pembayaran Angsuran Sebagian Saat Jatuh Tempo

Tgl	Keterangan	Debit(Rp)	Kredit(Rp)
	Db. Kas	xxx	
	Db. Piutang <i>murabahah</i> jatuh Tempo	xxx	
	Kr. Piutang <i>murabahah</i>		xxx
	Db. Margin <i>murabahah</i> yang Ditangguhkan	xxx	
	Kr. Pendapatan margin <i>murabahah</i>		xxx
	Kr. Pendapatan margin <i>murabahah-akrua</i>		xxx

Sumber : Rizal Yaya, dkk. (Akuntansi Perbankan Syariah)

Nasabah membayar kekurangan angsuran, jurnalnya :

Tabel 2.10  
Pembayaran Angsuran Setelah Jatuh Tempo

Tgl	Keterangan	Debit(Rp)	Kredit(Rp)
	Db. Kas	xxx	
	Kr. Piutang <i>murabahah</i>		xxx
	Db. Pendapatan margin <i>murabahah-akrual</i>	xxx	
	Kr. Pendapatan margin <i>murabahah</i>		xxx

Sumber : Rizal Yaya, dkk. (Akuntansi Perbankan Syariah)

- 4) Pembayaran angsuran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dengan pengenaan denda keterlambatan.

Bank syariah diperbolehkan mengenakan denda pada nasabah yang mampu membayar angsuran, tapi sengaja menunda pembayarannya. Berdasarkan PSAK 102 paragraf 29 disebutkan bahwa denda diakui sebagai bagian dari kebajikan.

Tabel 2.11  
Pembayaran Angsuran Setelah Jatuh Tempo Dan Denda

Tgl	Keterangan	Debit(Rp)	Kredit(Rp)
	Db. Piutang <i>murabahah</i> jatuh Tempo	xxx	
	Kr. Piutang <i>murabahah</i>		xxx
	Db. Margin <i>murabahah</i> yang Ditangguhkan	xxx	
	Kr. Pendapatan margin <i>murabahah-akrual</i>		xxx
	Db. Kas	xxx	
	Kr. Piutang <i>murabahah</i> jatuh Tempo		xxx
	Db. Pendapatan margin <i>murabahah-akrual</i>	xxx	
	Kr. Pendapatan margin <i>Murabahah</i>		xxx
	Db. Kas	xxx	
	Kr. Rekening dana kebajikan		xxx

Sumber : Rizal Yaya, dkk. (Akuntansi Perbankan Syariah)

- 5) Pembayaran untuk melunasi piutang lebih awal dari waktu yang ditentukan (pelunasan dini).

Berdasarkan PSAK 102 tentang akuntansi *murabahah*, potongan pelunasan piutang *murabahah* dapat diberikan pada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati (paragraf 26).

**Alternatif 1 : potongan diberikan saat pelunasan**

Berdasarkan metode ini, bank sebagai penjual mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah*.

Tabel 2.12  
Potongan Diberikan Saat Pelunasan

Tgl	Keterangan	Debit(Rp)	Kredit(Rp)
	Db. Beban potongan pelunasan <i>Murabahah</i>	xxx	
	Kr. Piutang <i>murabahah</i>		xxx
	Db. Kas/rekening nasabah	xxx	
	Kr. Piutang <i>murabahah</i>		xxx
	Db. Margin <i>murabahah</i> yang Ditangguhkan	xxx	
	Kr. Pendapatan margin <i>murabahah</i>		xxx
	Ket: dalam laporan laba rugi, beban potongan akan mengurangi pendapatan margin <i>murabahah</i>		

Sumber : Rizal Yaya, dkk. (Akuntansi Perbankan Syariah)

**Alternatif 2: potongan diberikan setelah pelunasan**

Pada metode ini, bank sebagai penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli.<sup>25</sup>

<sup>25</sup> *Ibid.*, h.172

Tabel 2.13  
Potongan Setelah Pelunasan

Tgl	Keterangan	Debit(Rp)	Kredit(Rp)
	Db. Kas/rekening nasabah	xxx	
	Kr. Piutang <i>murabahah</i>		xxx
	Db. Margin <i>murabahah</i> yang Ditangguhkan	xxx	
	Kr. Pendapatan margin <i>Murabahah</i>		xxx
	Db. Beban potongan pelunasan	xxx	
	Kr. Kas/rekening nasabah		xxx

Sumber : Rizal Yaya, dkk. (Akuntansi Perbankan Syariah)

## B. Murabahah

### 1. Pengertian *Murabahah*

Kata *Murabahah* sudah tidak asing lagi terdengar saat ini, terlebih lagi dengan semakin berkembangnya perbankan dan lembaga keuangan syariah di Indonesia. *Murabahah* adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual tersebut disetujui pembeli.<sup>26</sup>

*Murabahah* merupakan konsep jual beli barang diantara dua pihak. Menurut konsep ini kedua pihak setuju menjual dan membeli pada suatu tingkat harga yang di dalamnya terkandung segala biaya barang dan juga keuntungan, konsep ini juga dikenali sebagai konsep *mark up price* atau harga dinaikkan.<sup>27</sup>

Sumber lain menyebutkan *murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang

<sup>26</sup> Lukman hakim, *Prinsip – Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h.116-117

<sup>27</sup> Sudin Haron, *Prinsip dan Operasi Perbankan*, 1996, dikutip oleh Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015) h. 29

kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.<sup>28</sup>

Dengan merujuk pada pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud *murabahah* adalah akad jual beli barang yang menyepakati bersama harga perolehan barang dan keuntungan (margin) oleh penjual dan pembeli. Dimana pembayarannya bisa dilakukan secara tunai atau dicicil kemudian hari melalui kesepakatan bersama pada saat akad.

## 2. Dasar Hukum *Murabahah*

Al-qur'an sebagai pedoman hidup umat islam mengisyaratkan *Murabahah* dalam salah satu ayatnya yaitu :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى  
اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : “Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan

<sup>28</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 138

*riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti, baginya apa yang telah diambilnya dahulu dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah (2) : 275)*

Ayat tersebut menjelaskan Allah tidak melarang jual beli selama itu bukan yang mengandung riba. Riba ada dua macam: *nasiah* dan *fadhl*. Riba *nasiah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba *fadhl* adalah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba *nasiah* yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat arab zaman jahilliyah.<sup>29</sup> Oleh karenanya jual beli dengan menggunakan akad *murabahah* adalah salah satu bentuk penerapan jual beli yang tidak mengandung riba.

Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di

<sup>29</sup> Mardani, *Ayat – Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 13



*antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa (4): 29)*

Diketahui dari ayat diatas bahwa ditegaskan kepada orang orang mukmin dilarang saling mengkhianati sesama saudaranya selama bemuamalah sampai saling merelakan diantara keduanya.

Dari Abu Sa'id Al – Khudri, Rasulullah SAW bersabda *“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.”*(HR. Al- Baihaqi, Ibnu Majah, dan Shahih menurut Ibnu Hibban).<sup>30</sup> berdasarkan hadist tersebut telah jelas bahwa jual beli yang terjadi oleh penjual dan pembeli harus saling suka sama suka dan saling rela. Oleh karena kerelaan adalah perkara yang tersembunyi, maka ketergantungan hukum sah tidaknya jual beli itu dilihat dari cara-cara yang nampak (*dhahir*) yang menunjukkan suka sama suka, seperti adanya ucapan penyerahan dan penerimaan.

Ditegaskan lagi dengan sabda Rasulullah SAW lainnya yaitu: *”Ada tiga hal yang mengandung keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandung dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual.”* (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)<sup>31</sup> Hadist ini menjelaskan bahwa jual beli dihalalkan dan tidak perlu diragukan, asalkan jual beli dilakukan tidak ada unsur pemaksaan.

---

<sup>30</sup> Sri Nurhayati - Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia, Ed. 3*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 178

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 179

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* telah menetapkan ketentuan dalam bank syariah:

a. Pertama,

Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syari'ah :

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan dalam Islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

- 9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

b. Kedua,

Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah :

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

7) Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:

- a) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
- b) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

c. Ketiga,

Jaminan dalam *Murabahah* :

- 1) Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
- 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

d. Keempat,

Utang dalam *Murabahah* :

- 1) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.

- 2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- 3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

e. Kelima,

Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah* :

- 1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- 2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

f. Keenam,

Bangkrut dalam *Murabahah* :

Jika nasabah dinyatakan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda sampai ia sanggup kembali atau berdasarkan kesepakatan.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 04/DSN-MUI/IV/2000 (On-line), tersedia di: <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa> dikutip pada hari Senin, 22 April 2019 pukul 15.37 WIB di Way Galih

### 3. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Rukun dari akad jual beli *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa yaitu :

- a. Pelaku akad. Yaitu *bai'* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- b. Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga).
- c. *Shighah*, yaitu *ijab* dan *qabul*.<sup>33</sup>

Syarat *Murabahah*, yaitu :

- a. Penjual harus memberi tahu biaya modal kepada nasabah
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- c. Kontrak harus bebas riba
- d. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.<sup>34</sup>

### C. *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)

#### 1. Pengertian *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)

BMT adalah singkatan dari *Baitul Maal Wa Tamwil* atau dapat ditulis dengan *Baitul Maal Wa Baitul Tamwil*, secara *harfiyah* atau *lughowi baitul maal* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul maal* dikembangkan berdasarkan perkembangannya, yakni dari masa Nabi sampai abad pertengahan

<sup>33</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 82

<sup>34</sup> Loc.Cit.,



perkembangan islam. Dimana *baitul maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis bermotif laba.<sup>35</sup>

Dari pengertian tersebut dapatlah ditarik suatu pengertian bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT terlihat pada definisi *baitul maal*, sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi *baitul tamwil*. Sebagai lembaga sosial, *baitul maal* memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Oleh karena itu, *baitul maal* ini harus didorong agar mampu berperan secara professional menjadi LAZ yang mapan. Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan sumber dana-dana sosial yang lain.<sup>36</sup>

*Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandasan pada sisitem ekonomi yang salam : keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan.

*Baitul maal* (rumah harta), menerima titipan zakat, infaq, dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan

---

<sup>35</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), h.126

<sup>36</sup> Loc.Cit.,

dan amanahnya. *Baitul Tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan pengembangan usaha-usaha produktif atau investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menjunjung pembiayaan kegiatan ekonomi.<sup>37</sup>

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya pada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun pada sektor keuangan.

Secara umum profil BMT dapat dirangkum dalam butir-butir berikut :

a. Tujuan BMT

Tujuan BMT adalah untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

b. Sifat BMT

Sifat BMT yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, ditumbuhkembangkan dengan swadaya dan dikelola secara professional secara berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungannya

---

<sup>37</sup> M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Solo: PT Era Audicitra Intermedia, 2011), h.377

c. Visi BMT

Visi BMT adalah untuk menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat dan kuat, yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdian Allah memakmurkan kehidupan anggota dan umat manusia.

d. Misi BMT

Misi BMT adalah untuk mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju serta gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil dan berkemakmuran berkemajuan.

e. Fungsi BMT

Fungsi BMT diantaranya adalah :

- 1) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok usaha anggota muamalat(Pokusma) dan kerjanya.
- 2) Mempertinggi kualitas SDM anggota dan Pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global.
- 3) Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 452

## 2. Prinsip Utama *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)

Dalam melaksanakan usahanya, BMT berpegang teguh pada prinsip utamanya sebagai berikut:

- a. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip syariah dan muamalah islam ke dalam kehidupan nyata.
- b. Keterpaduan, yakni nilai spiritual dan moral mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, adil, dan berakhlak mulia.
- c. Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan, pengurus dengan semua anggota, dibangun rasa kekeluargaan, sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung.
- d. Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap, dan cita-cita antar semua elemen BMT. Antara pengelola dengan pengurus harus memiliki satu visi bersama-sama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.
- e. Kemandirian, yaitu mandiri diatas semua golongan politik. Mandiri juga tidak tergantung dengan dana-dana pinjaman dan bantuan tetapi senantiasa proaktif untuk menggalang dana masyarakat.
- f. Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi yakni dilandasi dengan dasar keimanan. Kerja yang tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia saja, tetapi juga kenikmatan dan kepuasan rohani dan akhirat. Kerja keras dan cerdas yang dilandasi dengan

pengetahuan yang cukup, ketrampilan yang cukup ditingkatkan, serta niat dan gairah yang kuat. Semua itu dikenal dengan kecerdasan emosional, spiritual, dan intelektual. Sikap profesionalisme dibangun dengan semangat untuk terus belajar demi mencapai tingkat standar kerja yang tertinggi.

- g. Istiqomah, yakni konsisten, konsekuen, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tidak pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap berikutnya dan hanya kepada Allah SWT kita berharap.<sup>39</sup>

### **3. Prosedur Pendirian *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)**

*Baitul Maal Wa Tamwil* merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah nonperbankan yang sifatnya informal yaitu lembaga keuangan yang didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga lainnya.

BMT dapat didirikan dan dikembangkan dengan suatu proses legalitas hukum yang bertahap. Awalnya dapat dimulai sebagai kelompok swadaya masyarakat dengan mendapatkan sertifikat operasi/kemitraan dari PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil Menengah) dan jika telah mencapai nilai aset tertentu segera menyiapkan diri ke dalam badan hukum koperasi.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Muhammad Ridwan, Op.Cit., h. 130

<sup>40</sup> Andri Soemitra, OP.Cit., h.456

Penggunaan badan hukum kelompok swadaya masyarakat dan koperasi untuk BMT disebabkan karena BMT tidak termasuk kepada lembaga keuangan formal yang di jelaskan dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Yang dapat dioperasikan untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat adalah bank umum dan bank penkreditan rakyat, baik dioperasikan dengan cara konvensional maupun dengan prinsip syariah bagi hasil.<sup>41</sup> Dengan demikian BMT tidak diawasi oleh OJK namun pihak yang melakukan pengawasan terhadap operasional dan kinerja BMT adalah Dinas Koperasi dan UMKM Republik Indonesia.

#### 4. Produk *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)

Produk BMT secara umum dapat diklasifikasikan menjadi empat hal yaitu:

- a. Produk penghimpunan dana (*funding*)
- b. Produk penyaluran dana (*lending*)
- c. Produk jasa
- d. Produk tabarru': ZISWAH (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan Hibah)<sup>42</sup>

Produk penghimpunan dana yang ada di BMT pada umumnya berupa simpanan atau tabungan yang didasarkan pada akad *wadiah* dan akad *mudharabah*. Untuk itu dalam BMT dikenal adanya dua jenis simpanan yaitu simpanan *wadiah* dan simpanan *mudharabah*.

<sup>41</sup> Ibid, h.457

<sup>42</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) h.27



Secara fikih, akad *wadiah* ditinjau dari boleh tidaknya penerima titipan untuk memanfaatkan barang titipan tersebut dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

- a. Wadiah al-Amanah, yaitu akad wadiah yang mana pihak yang menerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang yang dititipkan.
- b. Wadiah ad Dhamanah, yaitu akad wadiah yang mana pihak yang menerima titipan diperbolehkan untuk memanfaatkan uang/barang yang dititipkan, dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu pemilik barang membutuhkan uang/barang yang bersangkutan masih utuh.<sup>43</sup>

BMT akan menggunakan akad *wadiah ad dhamanah* dalam produk simpanannya, sehingga ia dapat menggunakan dana yang disimpan oleh nasabah untuk kegiatan produktif. Hal demikian juga mendatangkan keuntungan bagi nasabah, yakni bahwa nasabah dimungkinkan mendapatkan bonus yang besarnya tergantung pada kebijakan BMT dan tidak boleh diperjanjikan di muka. Melalui simpanan wadiah nasabah BMT terhindar dari risiko kerugian, akan tetapi potensi penghasilan atau keuntungan yang akan diperoleh juga kecil karena sangat tergantung pada kebijakan dari BMT yang bersangkutan.

Dalam hal nasabah BMT menghendaki uang yang di simpan juga memberikan tambahan pendapatan atau memang ditujukan sebagai sarana investasi maka BMT juga menyediakan produk simpanan yang

---

<sup>43</sup> Ibid, h47

di dasarkan pada akad *mudharabah*. Melalui simpanan *mudharabah* nasabah berpeluang mendapatkan penghasilan yang besarnya sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan di awal akad. Namun demikian nasabah yang memakai skema simpanan *mudharabah* juga menanggung risiko kerugian atas uang yang ia simpan.<sup>44</sup>

Dalam kegiatan penyaluran dan pengembangan dana yang dilakukan oleh BMT harus berdasarkan pada akad-akad tradisional Islam, yakni akad jual beli, akad bagi hasil, akad sewa-menyewa, dan akad pinjam-meminjam.

a. Akad Jual Beli

Jual beli intinya adalah akad antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana obyeknya adalah barang dan harga. Adapun penerapan dari akad jual beli ini dalam transaksi BMT tampak dalam produk pembiayaan yaitu *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.

b. Akad Bagi Hasil

Akad bagi hasil dalam produk BMT di bidang penghimpunan dana adalah dalam bentuk simpanan, sedangkan implementasinya dalam produk penyaluran dana adalah pada produk pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*

---

<sup>44</sup> Ibid., 56

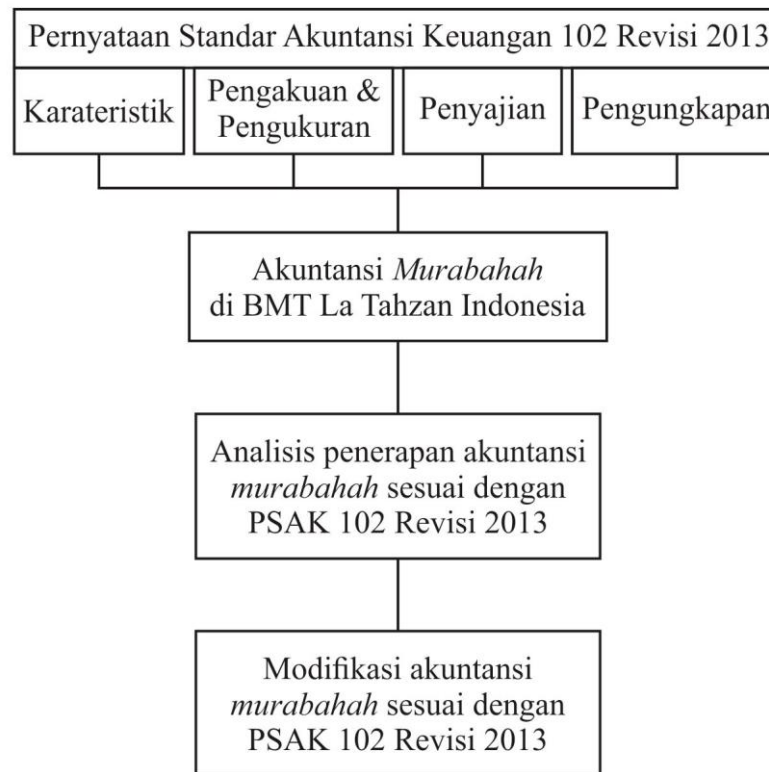
c. Akad Sewa-menyewa

Sewa-menyewa merupakan perjanjian yang obyeknya adalah manfaat atas suatu barang atau pelayanan, sehingga bagi pihak yang menerima manfaat berkewajiban untuk membayar uang sewa/upah (*ujrah*). Dalam praktik BMT akad sewa-menyewa ini diterapkan dalam produk penyaluran dana berupa pembiayaan *ijarah* dan pembiayaan *ijarah muntahia bit tamlik* (IMBT)

d. Akad Pinjam-meminjam

Dalam sistem konvensional produk penyaluran dana berupa kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam dengan ketentuan bahwa nasabah debitur wajib membayar bunga berdasarkan presentase tertentu terhadap pokok pinjaman. Ini merupakan riba, yang jelas-jelas dilarang dalam Islam. Dalam Islam akad pinjam-meminjam juga disediakan tetapi hanya pada keadaan darurat, artinya bahwa pinjaman akan diberikan hanya kepada nasabah yang benar-benar membutuhkan uang. Pihak BMT selaku pemberi pinjaman dilarang meminta imbalan betapapun kecilnya, karena itu termasuk riba. Dalam operasional BMT transaksi pinjam-meminjam ini dikenal dengan nama pembiayaan *qardh* dan Pembiayaan *qardh al-hasan*.

#### D. Kerangka Berfikir



Sumber : Data diolah (2019)

Kerangka berfikir tersebut menjelaskan alur dari penelitian ini. Dimana pernyataan standar akuntansi keuangan 102 tentang pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan akan dipadukan dengan akuntansi *murabahah* yang ada di BMT La Tahzan Indonesia kemudian setelah itu di analisis penerapannya apakah telah sesuai dengan standar yang berlaku saat ini. Selanjutnya apabila ketidakcocokan antara teori yang di muat dalam PSAK 102 Revisi 2013 Akuntansi *murabahah* dengan praktek yang di terapkan di BMT La Tahzan Indonesia, maka dapat memodifikasi akuntansi *murabahah* tersebut agar sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu PSAK 102 Revisi 2013.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M Nur Rianto. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Bandung: PUSTAKA SETIA 2015.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- AT- THAYYIB AL-QUR'AN. *Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group, 2001.
- Dewan Syariah Nasional MUI dan Bank Indonesia. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: CV. Gaung Persada, 2006. Cet. 3.
- Febrian, Rani dan Mardian, Sepky. Penerapan PSAK NO. 102 Atas Transaksi *Murabahah*: Studi Pada Baitul Maal Wa Tamwil Di Depok, Jawa Barat. *Journal of Islamic Economics and Business Volume 2, No 1 (2017)*.
- Habibah, Muzayyidatul dan Nikmah, Alfu. Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan *Murabahah* Di Bmt Se-Kabupaten Pati. *Jurnal Ekonomi Syariah Volume 4, Nomor 1, Juni 2016*.
- Hakim, Lukman. *Prinsip – Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Harahap, Sofyan syafri. *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara 2004.
- Hidayat, Solikhul. Penerapan Akuntansi Syariah Pada BMT Lisa Sejahtera Jepara. *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis Vol. 10 No. 2 Oktober 2013*
- IAI. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Murab.....*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2007.
- Ismail. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.

Mansour, Israa dan Sa'adeh, Yousef. Evaluating Murabaha in Islamic Banks. *International Journal for Innovation Education and Research* Vol:-4 No-06, 2016 p.188

Mardani. *Ayat – Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Moh. Pabundu Tika. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara 2006.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian, Cetakan Kespuluh*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.

Parno dan Tikawati. Analisis Penerapan PSAK No. 102 untuk Pembiayaan Murabahah pada KPN IAIN Samarinda. *Jurnal Ekonomi Islam (Islamic Economics Journal)* Vol.4, No.2 Juli - Desember 2016.

Pratiwi, Inggrid Eka dan Septiarini, Dina Fitrisia. Analisis Penerapan PSAK – 102 Murabahah (Studi Kasus Pada KSU BMT Rahmat Syariah Kediri). *Jurnal Akuntansi AKRUAL* 6 (1) (2014): 17-32 e-ISSN: 2502-6380.

Rudianto. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Erlangga, 2009.

Rusydi, Muhammad dan Nasir, Sri Salasiah. Perlakuan Akuntansi Murabahah ditinjau dari PSAK no. 102 pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar. *Jurnal Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan* Volume 1 No. 1 Januari-April 2009.

Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2009.

S.R, Soemarso. *Akuntansi suatu Pengantar Edisi 5 Revisi*. Jakarta : Salemba Empat 2009.

Sri Nurhayati – Wasilah. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.

Sudarsono, Heri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2005.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta CV, 2010.

-----, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D, cet. Ke 20*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Sumitro, Warkum. *Asas – asas perbankan Islam dan lembaga – lembaga terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah) di Indonesia*, Edisi Revisi Cet. 1. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004

Usanti, Trisadini P dan Abd. Shomad. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Yaya. Rizal, dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah; Teori dan Praktek Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat, 2016.

Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori – Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara 2007.

<http://iaiglobal.sharepoint.com>

<https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa>

